

BAB II

KEHADIRAN KOMUNITAS KOREA UTARA (CHONGRYON) DI JEPANG

Pada bab ini akan mendeskripsikan tentang Sejarah dan dinamika kelompok diaspora masyarakat Korea ke Jepang yang berawal dari masa kolonialisme Jepang di Korea. Didalamnya meliputi perkembangan aktivitas Chongryon di Jepang dari masa ke masa. Selain itu juga akan membahas kondisi terkini masyarakat Korea Utara di Jepang.

A. Sejarah Diaspora Masyarakat Korea Utara ke Jepang

Dalam sejarah, Korea Utara dan Jepang terlibat konflik yang panjang. Pasca Perang antara Rusia dan Jepang pada tahun 1905 mereda, Jepang mengambil kendali secara *de facto* atas Korea, dan secara resmi menduduki Semenanjung Korea pada tahun 1910. Kedudukan Jepang atas Korea tersebut merupakan bagian dari upaya untuk membangun kerajaan Jepang yang mandiri secara ekonomi dan meluas, Jepang membangun industri besar di bagian utara Peninsula (Blomquist & Wertz, 2015). Korea harus menjadi pemasok sumber daya alam untuk Jepang seperti peralatan baja, mesin dan bahan kimia, serta bahan makanan.

Selain memanfaatkan sumber daya alam, Jepang sebagai negara yang mengendalikan kekuasaan saat itu menerapkan kebijakan yang keras dan represif terhadap rakyat Korea. Bahkan pada masa itu Jepang juga mengobarkan perang di seluruh Asia dan Pasifik, pemerintah dan militernya mulai mengalihkan masyarakat Korea untuk bekerja sebagai tentara, pekerja industri dan menjadikan wanita sebagai pekerja seks untuk melayani para tentara Jepang yang sedang berperang. Setidaknya terdapat 2,1 juta warga korea juga di mobilisasi ke Jepang atas alasan tersebut.

Masyarakat Korea yang berada di Jepang terbangun menjadi sebuah komunitas (*zainichi*). Komunitas tersebut pada awalnya adalah organisasi yang netral secara politik yang

bekerja untuk membantu lebih dari 2 juta warga Korea yang tinggal di Jepang kembali pulang ke kampung halaman mereka, atau membantu mencari mata pencaharian bagi mereka yang memutuskan untuk menetap di Jepang. Berdirinya Komunitas Korea di Jepang dilatarbelakangi oleh pandangan masyarakat Jepang terhadap orang-orang Korea seperti sebuah ruang asing di tengah-tengah Jepang. Zainichi generasi pertama pada waktu itu menanggung kesengsaraan khusus mereka masing-masing, kondisi tersebut menumbuhkan semangat untuk bertahan hidup bersama (Sangjung, 2007).

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II Korea harus dibebaskan dari kolonialisme Jepang. Tiga tahun pasca perang dunia II berdirilah Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) yang dipimpin oleh Kim Il-sung di utara atas dukungan Uni Soviet dan Republik Korea (ROK) yang dipimpin oleh Syngman Rhee di bagian selatan atas dukungan Amerika Serikat. Baik Syngman Rhee dan Kim Il-sung bertujuan menyatukan kembali Korea di bawah sistem politik mereka masing-masing. Sementara Rhee menganut sistem pemerintahan demokratis, Kim ingin mendirikan pemerintahan komunis untuk Korea yang bersatu kembali. Persaingan kedua ideologi tersebut menciptakan ketegangan dan kebersamaan permusuhan antara Selatan dan Utara (Overview: the Korean War and its Legacy, 2010). lebih lanjut Perang yang terjadi antara dua Korea pecah pada 25 Juni 1950, berawal dari penyerbuan Tentara Korea Utara ke Korea Selatan.

Pecahnya Korea Utara dan Korea Selatan juga berpengaruh terhadap masyarakat Korea yang tinggal di Jepang. Mereka juga harus memilih apakah akan berafiliasi dengan Korea Utara atau dengan Korea Selatan. Orang-orang Korea yang setuju dengan visi komunis Kim Il-sung, mengambil kendali penuh atas masyarakat dengan memberentuk Komunitas Chongryon. Sebaliknya, warga Korea yang tidak setuju dengan visi komunis malah membentuk komunitas diaspora Korea Selatan yang terpisah dan disebut Mindan, yang berarti komunitas Korea Jepang terpisah

sepanjang garis yang sama dan sekitar waktu yang sama dengan semenanjung Korea.

Pemimpin Korea Utara yang mendukung pendanaan Zainici agar berafiliasi dengan Korea Utara. Kim il Sung saat itu menekankan pentingnya penyelarasan berkelanjutan dengan Korea Utara untuk Chongryon dan integrasi diaspora Korea di Jepang. Kim il Sung bahkan berulang kali menyarankan bekerjasama dengan Mindan Korea yang pro-Korea Selatan. Namun bagi anggota Chongryon saran untuk menjaga hubungan dekat dengan Mindan terasa sama saja dengan penekanan Korea Utara pada penyatuan kembali semenanjung atau desakannya pada demokrasi. Dalam pengertian ini, Chongryon adalah versi miniatur rezim Korea Utara. Terbelah antara realitas dan ideologi, Chongryon akan terus berjuang dengan kontradiksi antara sikap ideologisnya dan tindakannya.

Chongryon didirikan pada bulan Mei tahun 1955 setelah sebelumnya sempat dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena terlibat dalam demonstrasi ilegal yang dipimpin oleh Partai Komunis Jepang, tetapi berhasil mengatur kembali sebagai Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang. Tujuan didirikan kembali komunitas ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Korea Utara, bekerja untuk penyatuan damai dari dua Korea dan melindungi hak-hak orang Korea Utara di Jepang. Chongryon adalah kelompok masyarakat Korea terbesar di Jepang, dengan lebih dari 500.000 anggota (Lee, Japan's North Korean Diaspora, 2018).

Pada 10 tahun pertama, anggota Chongryon lebih banyak daripada Mindan. Setelah Jepang melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Selatan pada tahun 1965, anggota Mindan mendapat beberapa keuntungan yaitu diakuinya Kewarganegaraan Korea Selatan misalnya diakuinya paspor Korea Selatan dan terdaftar sebagai permanen residen di Jepang. Sementara anggota Chongryon tidak memiliki dokumen yang valid untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan tidak memiliki status sebagai residen di Jepang sampai tahun 1981. Hingga saat ini Jepang

dan Korea Utara belum melakukan normalisasi hubungan sehingga Chongryon merupakan perwakilan Korea Utara secara tidak resmi di Jepang karena kedua negara belum menjalin hubungan diplomatik (FATHARINI, 2015)

B. Aktivitas Komunitas Chongryon di Jepang

Imigran Korea di Jepang mendirikan banyak organisasi gotong royong, lembaga keagamaan, dan badan-badan yang mengatur diri sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Korea, dan dengan demikian sekaligus berfungsi untuk membangun identitas Korea di Jepang.

Hingga abad 21 Komunitas masyarakat Korea Utara di Jepang masih eksis keberadaanya. Organisasi ini tidak hanya komunitas budaya, ideologi tetapi juga komunitas ekonomi, yang memberikan pengaruhnya pada pekerjaan, pendidikan, dan bahkan cara hidup bagi anggota komunitas tersebut. Namun aktivitas Chongryon secara konsisten dari masa ke masa selalu mengundang kontroversi di Jepang. Tercatat bahwa agen Korea Utara melakukan serentetan penculikan warga Jepang namun tidak diakui oleh Chongryon maupun pemerintah Korea Utara. Chongryon juga mendirikan sekolah sekolah Korea di Jepang, para Siswa yang telah berjanji setia kepada Korea Utara diajarkan kursus lanjutan dalam fisika nuklir dan teknik kontrol di Jepang (Fitsanakis, 2016). Chongryon juga sering digunakan sebagai media bagi spionase dan propaganda oleh pemerintah Korea Utara, yang berfungsi sebagai media aksi dalam persaingan Korea Selatan dengan Korea Utara. Karena kelompok diaspora pro-Korea Selatan Mindan jauh lebih kecil daripada Chongryon, pengaruh yang lebih tinggi di negara tersebut menjadi kebutuhan strategis bagi setiap pemerintah yang ingin mempertahankan pengaruh pada diaspora Korea di Jepang.

Disamping fokus pada tujuan diaspora di Jepang, selang waktu tahun 1959 hingga 1984, Chongryon yang disokong oleh pemerintah Korea Kim Il Sung memfasilitasi "repatriasi" lebih dari 93.000 penduduk Korea di Jepang untuk

kembali ke Korea Utara (Makinen, 2016) Dampaknya orang-orang Korea Utara yang dikembalikan ke Korea Utara, sering menghadapi kesulitan ekonomi, kecurigaan dari badan-badan keamanan, dan kemampuan terbatas untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga di Jepang. Lebih dari seribu migran adalah warga yang sudah dinaturalisasi kewarganegaraannya menjadi warga Jepang. Termasuk pasangan Jepang dari etnis Korea, anak-anak dari serikat campuran etnis, dan etnis Korea yang telah melalui proses panjang untuk mendapatkan kewarganegaraan. Migrasi saat itu juga mengalami perlambatan karena kondisi ekonomi yang memburuk di Korea Utara, dan karena berita tentang realitas di lapangan disaring kembali ke komunitas Korea di Jepang.

Sementara anggota Chongryon yang masih menetap di Jepang terus genjar memasivkan pergerakannya. Salah satunya dengan mengaktifkan Homepage situs web resmi Chongryon yang penuh dengan slogan propaganda Korea Utara dan berbagai tautan ke media yang dioperasikan oleh rezim Korea Utara. Hal yang menarik adalah adanya campuran karakter Jepang dan slogan propaganda yang ditulis dalam bahasa Korea mewakili identitas komunitas ini di tengah-tengah masyarakat Jepang. Sikap politik dalam pengenalan identitas diri Chongryon juga sejalan dengan Korea Utara, menggunakan frase anti Amerika seperti "Amerika Serikat imperialis, Amerika telah secara ilegal menduduki Korea Selatan"

Selain melakukan propaganda di media, Chongryon juga mendirikan Sekitar 130 lembaga pendidikan berafiliasi dengan Korea Utara, bahkan termasuk Universitas Korea (meskipun situs resmi hanya mendaftar 66 lembaga pendidikan, jumlah sebenarnya diyakini dua kali lipat lebih banyak). Lembaga-lembaga tersebut didanai oleh perusahaan "Chongryongye", sebuah istilah yang mewakili perusahaan-perusahaan yang berada dibawah pengawasan di Chongryon (Lee, Japan's North Korean Diaspora, 2018).

Pada saat yang sama, Chongryon secara finansial membantu rezim Korea Utara sebagai hubungan timbal balik

yang dilakukan oleh Kim Il sung saat proses polarisasi komunitas Korea Utara dan Korea Selatan. Chongryon juga mendirikan *the Korean Science and Technology Association in Japan* (KSTA) yang menyediakan dukungan materi dan teknis untuk program senjata Korea Utara (Durand J. F., 2017)

Namun demikian, eksistensi Chongryon yang berkelanjutan dapat dijelaskan dari faktor-faktor praktis. Meskipun diduga lembaga boneka yang mewakili pemerintah Korea Utara di Jepang, yang masih belum mampu menormalisasi hubungan Jepang dengan Korea Utara, anggota Chongryon tampaknya tetap bertahan karena pertimbangan ekonomis dan praktis dari pada motivasi ideologis.

C. Kondisi Terkini Komunitas Korea Utara di Jepang

Pada tahun 2005 serikat dagang Korea Utara di Jepang mengalami masalah dengan pihak agensi yang bekerjasama dengan Chonryon, agensi tersebut menuntut Chongryon dengan mengklaim bahwa sekitar 62,7 miliar yen dalam bentuk kredit bermasalah dan dengan demikian Chongryon harus membayarnya kembali terhadap pihak agensi. Pada tahun 2007, sebuah putusan pengadilan yang memerintahkan Chongryon untuk membayar kembali seluruh jumlah itu diselesaikan.

Menghadapi pembatasan kontak dengan agensi, kesulitan keuangan, dan dukungan yang menurun di antara orang-orang Korea, keanggotaan Chongryon menjadi berkurang dalam beberapa tahun terakhir, dengan keanggotaan turun dari 500.000 di puncak organisasi menjadi sekitar 150.000 saat didata tahun 2009. Bahkan, Chongryon telah menutup sebagian besar serikat kredit dan dua pertiga dari sekolah-sekolahnya Korea yang ada di Jepang, Pada bulan Juni 2012, pengadilan Jepang memerintahkan Chongryon untuk melelang bangunan markas besarnya di Tokyo untuk membayar hutangnya. Pada bulan Mei 2012, hal ini diperjelas melalui pemberitaan *Yomiuri Shimbun* sebuah surat kabar nasional Jepang yang melaporkan: “Gedung pusat Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang (Chongryon) kemungkinan

akan dilelang oleh lembaga nasional Jepang”. Hingga pada akhirnya Chongryon kehilangan kepemilikan markasnya pada tahun 2015, untuk keberlanjutan eksistensi Chongryon terus menyewakan ruang di gedung sebagai pusat kegiatan.

Pada bulan Maret 2015, polisi Jepang menyerbu rumah ketua Chongryon Ho Jong Man karena dicurigai mengimpor jamur Korea Utara ke Jepang secara ilegal, dan kemudian ditangkap empat orang, termasuk putra Ho, ditangkap dan dilakukan penyelidikan.